

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Ella Dianti¹, Sahade², Warka Syachbrani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

¹elladianti16@gmail.com, ²sahade@unm.ac.id, ³warka.syachbrani@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Human Resources (HR) competency and the implementation of Government Accounting Standards (SAP) on the quality of local government financial reports in the East Luwu Regency Government. This study was motivated by the continued discovery of several weaknesses in regional financial management even though East Luwu Regency has obtained an Unqualified Opinion (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK). In addition, some financial employees do not have adequate accounting education backgrounds, which has the potential to affect the quality of financial report preparation. This study uses compliance theory as a theoretical basis, explaining that apparatus compliance with applicable rules and standards can affect the quality of task implementation, including in the preparation of financial reports. The research method used is quantitative with the analysis unit of financial employees in several Regional Apparatus Organizations (OPD) in East Luwu Regency. The research sample amounted to 62 respondents who were determined using a saturated sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and coefficient of determination tests. The results of the study indicate that HR competency has a significant effect on the quality of local government financial reports with a regression coefficient of -0.212 and a significance value of 0.001. Meanwhile, SAP implementation has a positive and significant effect on the quality of financial reports with a regression coefficient of 0.112 and a significance value of 0.002. Simultaneously, HR competency and SAP implementation have a significant effect on the quality of local government financial reports. The Adjusted R² value of 0.292 indicates that both variables are able to explain 29.2% of the variation in the quality of financial reports, while 70.8% is influenced by other factors outside the study.

Keywords: LKPD Quality, HR Competence, Compliance Theory

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah meskipun Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, sebagian pegawai bagian keuangan belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai sehingga berpotensi memengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teori

kepatuhan sebagai landasan teoritis yang menjelaskan bahwa kepatuhan aparaturnya terhadap aturan dan standar yang berlaku dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan unit analisis pegawai bagian keuangan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur. Sampel penelitian berjumlah 62 responden yang ditentukan menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar -0,212 dan nilai signifikansi 0,001. Sementara itu, penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien regresi sebesar 0,112 dan nilai signifikansi 0,002. Secara simultan, kompetensi SDM dan penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai Adjusted R² sebesar 0,292 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 29,2% variasi kualitas laporan keuangan, sedangkan 70,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Kualitas LKPD, Kompetensi SDM, Teori Kepatuhan

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan dana publik yang berasal dari masyarakat untuk mendukung pembangunan, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Shadewi et al. 2024). Dalam konteks tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip efisiensi,

efektivitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Putri dkk, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat penerapan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah (Putri, Astuti, and Afianta 2025).

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, LKPD memiliki fungsi strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sekaligus sebagai alat ukur transparansi dan

akuntabilitas publik. Laporan keuangan menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai bagaimana dana publik dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui karakteristik kualitatif informasi keuangan, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Apabila karakteristik tersebut terpenuhi, informasi yang disajikan akan lebih bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Penelitian Gunawan dan Sujana menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD di Kabupaten Buleleng karena mampu menghasilkan laporan yang lebih transparan, akurat, dan kredibel (Gunawan and Sujana 2023).

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya

kemajuan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024 masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan. Permasalahan tersebut meliputi pengelolaan aset yang belum dilakukan secara memadai, pengelolaan aset lain-lain yang belum tertib khususnya terkait penggunaan Kode Inventaris Pemerintah (KIP) A–F yang belum diterapkan secara konsisten, serta pemusnahan persediaan yang belum didukung dengan berita acara atau dokumentasi resmi dari Puskesmas sehingga prosedur administrasi persediaan dinilai belum tertib. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan piutang, antara lain penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum optimal serta adanya piutang yang telah kedaluwarsa namun belum diusulkan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur. Sebagian

pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam memahami penerapan SAP maupun proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama karena adanya pembaruan aplikasi yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas aparatur secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada organisasi sebagai unit analisis, melainkan pada pegawai bagian keuangan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Fokus tersebut sejalan dengan penelitian Wayoi dkk, yang mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam pengembangan kompetensi SDM, seperti rendahnya tingkat pendidikan formal di bidang akuntansi dan minimnya pelatihan teknis yang

berkelanjutan (Wayoi et al. 2025). Husni dkk, juga menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung terciptanya laporan keuangan pemerintah yang akuntabel (Husni, Sahade, and Anwar 2025).

Selain kompetensi SDM, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Persediaan mengharuskan pemerintah daerah melakukan pencatatan, pengakuan, dan pelaporan persediaan secara andal sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Prayogo, Fikri, and Nandini 2023). Namun demikian, dalam praktiknya beberapa OPD di Kabupaten Luwu Timur masih menggunakan metode pencatatan fisik (periodik) dan belum menerapkan metode perpetual dalam pengelolaan persediaan, meskipun telah menggunakan metode penilaian First In First Out (FIFO). Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa sistem pengelolaan persediaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian Idris dan Syachbrani (2022) menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah di Sulawesi Selatan telah menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan menyajikan tujuh komponen laporan keuangan, masih terdapat kelemahan teknis dalam pengelolaan dan pencatatan persediaan (Idris and Syachbrani 2022). Walaupun kondisi tersebut tidak secara langsung bertentangan dengan ketentuan PSAP, praktik tersebut berpotensi mengurangi kualitas, relevansi, dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan (compliance theory) sebagai landasan teori. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa individu maupun organisasi cenderung mematuhi aturan, standar, dan regulasi yang berlaku karena adanya kewajiban normatif maupun tuntutan formal dari lingkungan institusional. Dalam konteks

pemerintahan daerah, teori ini menjelaskan bahwa aparaturnya pengelola keuangan akan berupaya mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penyusunan laporan keuangan daerah (Wijaya et al. 2025). Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAP dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun opini WTP telah berhasil dipertahankan, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 62 pegawai bagian keuangan pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala Likert lima tingkat, sedangkan instrumen penelitian telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas yang menunjukkan seluruh item pernyataan valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS melalui tahapan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan

heteroskedastisitas, serta analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial, dan uji koefisien determinasi (Adjusted R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Uji T

Tabel 1. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	40,958	5,473			7,484	0,001
Kompetensi Sumber Daya Manusia	-0,212	0,051		-0,455	-4,144	0,001
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,112	0,034		0,357	3,251	0,002

a). *Dependent Variable:* Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan t hitung $-4,144 > t$ tabel 2,002. Sementara itu, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai

signifikansi $0,002 < 0,05$ dan t hitung $3,251 > t$ tabel $2,002$. Dengan demikian, kedua variabel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Uji F

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	201.125	2	100.563	13.173
	Residual	435.058	57	7.533	
	Total	636.183	59		

1). Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 2). Predictors: (Constant), PSAP, Kompetensi SDM

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar $13,173$ yang lebih besar dari F tabel $3,16$ serta nilai signifikansi sebesar $0,001$ yang lebih kecil dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

3. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.316	.292	2.76272

1). Predictors: (Constant), PSAP, Kompetensi SDM
 2). Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar $0,292$ atau $29,2\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mampu menjelaskan variasi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar $29,2\%$, sedangkan sisanya sebesar $70,8\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t , variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001$ yang lebih kecil dari $0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-4,144$ yang lebih besar dari t tabel $2,002$. Hasil ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD diterima. Temuan ini

menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan.

Kompetensi SDM mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pegawai yang memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan akan lebih mampu menghasilkan laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menimbulkan kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengelolaan aset, maupun penyajian informasi keuangan sehingga berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan (compliance theory) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai akan lebih mudah mematuhi aturan dan standar yang berlaku (Romadhon and Diamastuti 2020).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap aturan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel, transparan, relevan, dan andal.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, arah pengaruh yang negatif mengindikasikan adanya kondisi tertentu di lapangan yang perlu mendapat perhatian. Temuan ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan bidang keuangan, distribusi tugas yang belum optimal, atau belum maksimalnya efektivitas pelatihan yang diberikan kepada aparatur. Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena yang ditemukan di Kabupaten Luwu Timur, di mana sebagian pegawai bagian keuangan tidak memiliki latar belakang akuntansi dan masih menghadapi kendala dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan serta penggunaan sistem informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani dkk, yang menyatakan bahwa kompetensi SDM menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Handayani, Sari, and Yuniarti 2022). Penelitian tersebut menemukan bahwa keterbatasan pendidikan dan pelatihan teknis menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, penelitian Sitanggang dkk. juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya laporan keuangan pemerintah yang akuntabel (Sitanggang et al. 2025). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta pendampingan teknis perlu terus dilakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang

lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,251 yang lebih besar dari t tabel 2,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD dapat diterima.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang digunakan dalam proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan pemerintah. Penerapan SAP secara konsisten akan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, semakin baik penerapan SAP dalam suatu organisasi perangkat daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam perspektif teori kepatuhan, penerapan SAP merupakan bentuk kepatuhan aparatur pemerintah terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat. Kepatuhan tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketika pegawai melaksanakan seluruh proses akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku, maka risiko kesalahan pencatatan dan penyajian informasi keuangan dapat diminimalkan sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa temuan terkait pengelolaan aset, persediaan, dan piutang yang menunjukkan bahwa penerapan SAP belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam SAP perlu terus dilakukan agar kualitas laporan keuangan dapat semakin baik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Melawati dan Kamela yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena mampu menghasilkan laporan yang lebih transparan, akurat, dan kredibel (Melawati and Kamela 2025). Penelitian Nasution dkk, juga menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam implementasinya (Nasution et al. 2024). Dengan demikian, penerapan SAP yang konsisten dan sesuai ketentuan menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai t hitung sebesar -4,144. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai yang terlibat

dalam pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar 3,251. Secara simultan, Kompetensi SDM dan Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, yang dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 13,173 lebih besar dari F tabel 3,16 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Adapun nilai Adjusted R Square sebesar 0,292 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan kualitas LKPD sebesar 29,2%, sedangkan sisanya sebesar 70,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, peningkatan kompetensi SDM dan optimalisasi penerapan SAP menjadi faktor penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Ida Bagus Adi, and Edy Sujana. 2023. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 14(03):824–37.
doi:<https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64893>.
- Handayani, Fice, Dina Mustika Sari, and Adea Yuniarti. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 11(1):9–20.
doi:<https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14>.
- Husni, Sahade, and Azwar Anwar. 2025. "Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1(7):379–87.
doi:<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i7.554>.
- Idris, Hariany, and Warka Syachbrani. 2022. "Penerapan Basis Akuntansi Akrua Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):8–13.
- Melawati, Desi, and Hurian Kamela. 2025. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Publik: Studi Pada DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi." *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4(3):1–9.
doi:<https://doi.org/10.57218/jueb.v4i3.1827>.

- Nasution, Putri Wulandari, Tria Wulandari, Nasirwan Nasirwan, Suhandi Suhandi, and Nurul Hasanah. 2024. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):26–33. doi:<https://doi.org/10.65510/jieb.v2i1.52>.
- Prayogo, Youdhi, Atar Satria Fikri, and Khairunnisa Puti Nandini. 2023. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah." *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi* 3(2):44–58. doi:<https://doi.org/10.51903/dinamika.v3i2.380>.
- Putri, Belia Inka, Angelica Astuti, and Aimandika Yudha Afianta. 2025. "Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Good Governance Dalam Akuntansi Sektor Publik." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 5(2):106–15.
- Romadhon, Fitri, and Erlina Diamastuti. 2020. "Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi." *Jurnal Ilmiah Esai* 14(1):122–34.
- Shadewi, Elsa Rani, Kayla Ratu Natia, M. Zidan Dairoby Ricardo, and Heni Noviarita. 2024. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan APBN Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kemadirian Ekonomi Daerah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2(12):1–12. doi:<https://doi.org/10.62281/v2i12.1278>.
- Sitanggang, Jelita Yulianti Br, Lestari Br Tohang, Yuliana Simatupang, and Nasirwan. 2025. "Hambatan Dan Inovasi Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Laporan Keuangan." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2(2):790–97. doi:<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.4188>.
- Wayoi, Encun Yuliana Idjare, Meinarni Asnawi, Adolf Z. D. Siahay, Paulus K. Allo Layuk, Syaikhul Falah, and Alfiana Antoh. 2025. "Strategi Pengembangan Kompetensi Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Pengawasan Di Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah." *Economics and Digital Business Review* 7(1):468–82.
- Wijaya, Nur Rizki, Ika Swasti Putri, Ratu Aghnia Raffaidy Wiguna, and Rika Nur Widiastutik. 2025. "Enhancing The Timeliness Of Local Goverment Financial Reporting: An Agency Theory And Compliance Theory Perspective." *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management* 8(2):137–54. doi:<https://doi.org/10.36406/ijbam.v8i2.190>.